

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Untuk mendukung visi dan misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang mengacu pada tujuan kedua misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang yaitu “meningkatnya kesejahteraan masyarakat” dan tujuan pertama dari misi ketiga yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel T-C 25

- I. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.

Analisisnya adalah :

1. Strategi daerah otonom yang mandiri dan tidak melalui proses pembangunan yang cukup panjang, maka Padang Panjang harus mampu melahirkan produk unggulan daerah yang tangguh dengan dasar utamanya adalah ekonomi kerakyatan.
2. Maknanya adalah :
  - a. Mampu bersaing dengan daerah lain
  - b. Adanya capaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
  - c. Harus ada ukuran kuantitatif terhadap peningkatan daya saing tersebut, misalnya tersebarnya produk-produk domestic regional bruto dan terciptanya lapangan kerja baru secara signifikan dalam berbagai sektor.

- II. Menurunnya tingkat pengangguran

Analisisnya adalah :

1. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya pengangguran di suatu daerah, antara lain terbatasnya peluang kerja, banyaknya calon tenaga kerja per tahun yang tidak mendapatkan lapangan usaha.
2. Untuk itu dengan program-program strategis daerah, diharapkan pada tahun terakhir kepemimpinan Walikota akan terjadi penurunan angka pengangguran yang signifikan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan. Sepanjang tahun 2019-2023 IKM pelayanan perizinan dan non perizinan ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 84 pada tahun 2019, 85 pada tahun 2020, 86 pada tahun 2021, 87 pada tahun 2022 dan 88 pada tahun 2023.

Peningkatan IKM tersebut ditargetkan melalui upaya-upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berstandar ISO-901 serta melalui upaya yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti pelatihan untuk pengelola pelayanan, penyelenggaraan mall pelayanan publik serta berbagai sosialisasi yang dilaksanakan.

Untuk memperoleh nilai Indek Kepuasan Msayarkat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dnegan rumkus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Kenaikan target kinerja IKM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

DATA AWAL/ TAHUN	NILAI AWAL 90	%
2018	81,75	3
2019	84	7
2020	85	8
2021	86	9
2022	87	10
2023	88	11